

## LAPORAN NOTULA

### ***OGI Goes to Campus: Penjaringan Masukan Publik terkait Isu Keterbukaan Pemerintah, Sumatera Utara***

Selasa, 29 Maret 2022 | Pukul 14.00 – 18.00

---

#### **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2022, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia melaksanakan perumusan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia yang ketujuh. Dalam rangka melaksanakan penjaringan terkait isu-isu keterbukaan pemerintah, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia melaksanakan kegiatan *OGI Goes to Campus*. Kegiatan ini akan mengundang berbagai macam stakeholders dari unsur pemerintah dan non-pemerintah untuk mendapatkan masukan maupun isu terkait keterbukaan pemerintah yang dapat didorong ke dalam RAN OGI VII.

#### **TUJUAN**

1. Menjaring masukan publik terkait isu keterbukaan pemerintah
2. Melaksanakan diseminasi isu terkait keterbukaan pemerintah

#### **PEMBAHASAN**

1. **Ibu Prahesti Pandanwangi**, Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN / Bappenas menyampaikan pengantar sekaligus sambutan untuk kegiatan OGI Goes to Campus sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Keterbukaan Pemerintah di Indonesia berlangsung sejak tahun 1998, sehubungan dengan jatuhnya Orde Baru. Sejak waktu tersebut, Indonesia selalu mendorong berbagai kebijakan terkait keterbukaan pemerintah, seperti terkait UU Tindak Pidana Korupsi, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Pelayanan Publik, hingga bergabung dengan *Open Government Partnership* (OGP) pada tahun 2011 sebagai salah satu pendirinya.
  - b. Sekretariat *Open Government Indonesia* (OGI) melaksanakan kegiatannya bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan juga Pemerintah. Kegiatan dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional dan juga mendorong nilai-nilai Open Government Indonesia.
  - c. Sekretariat OGI telah melaksanakan enam rencana aksi, dan sedang dalam proses penyusunan untuk Rencana Aksi Nasional ketujuh. Melalui kegiatan OGI Goes to Campus, diharapkan hadirnya dorongan komitmen yang berkelanjutan, meningkatkan kerjasama dan berbagi pengetahuan, serta memastikan partisipasi dan pelibatan masyarakat yang inklusif.
  - d. Kondisi keterbukaan pemerintah berdasarkan indeks dan data terkait menunjukkan adanya perbaikan khususnya di sektor pelayanan publik. Hal tersebut juga didorong dengan adanya penguatan transformasi digital yang menghadirkan pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi terkait. Indeks Keterbukaan Informasi Pemerintah (IKIP) juga menempatkan Indonesia dalam kondisi Sedang.
  - e. Terkait kondisi keterbukaan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara, menempati posisi ke-23 dan berada di bawah rata-rata nasional. Adapun indikator yang paling rendah ialah transparansi dan juga kebebasan dari penyalahgunaan informasi. Indeks lainnya (Indeks Demokrasi Indonesia,

Indeks Kebebasan Pers, dan Indeks Pembangunan Manusia) juga menggambarkan perlunya peningkatan terkait keterbukaan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

- f. Melalui kegiatan OGI Goes to Campus, diharapkan hadirnya masukan-masukan publik sebagai bagian dari penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia ketujuh untuk tahun 2022-2024. Masukan-masukan ini akan menjadi bagian dari pemetaan isu strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat Open Government Indonesia.
2. **Bapak Mugiyanto**, Tenaga Ahli Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:
  - a. Komitmen pemerintah Joko Widodo dalam mendorong keterbukaan pemerintah sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan melalui kehadiran Presiden dalam kegiatan OGP Global Summit, dengan menyampaikan dua poin penting, yaitu (1) Peningkatan Partisipasi Publik; (2) Penguatan Inovasi Digital yang inklusif.
  - b. Komitmen tersebut tercerminkan juga melalui prestasi-prestasi Indonesia dalam Open Government Partnership Award. Dalam penghargaan tersebut, Indonesia mendapatkan lima penghargaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa komitmen keterbukaan pemerintah di Indonesia semakin nyata dilaksanakan.
3. **Bapak Robinson**, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menjelaskan terkait kondisi keterbukaan pemerintah di Sumatera Utara sebagai berikut:
  - a. Kondisi keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara berada di bawah rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat kendala dalam keterbukaan informasi di Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Keterbukaan Informasi pada Badan Publik masih memiliki tantangan, karena keterbukaan informasi merupakan suatu *mindset* baru yang perlu dikerjakan oleh Badan Publik guna mendorong pemerintahan yang lebih baik. Namun, banyak pegawai pada Badan Publik belum memahami terkait pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjamin hadirnya pemerintahan yang lebih baik. Sehingga masih banyak badan publik yang belum memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah yang telah dicantumkan oleh KIP.
  - c. Belum terbukanya informasi dari badan publik dibuktikan melalui tingginya jumlah sengketa informasi yang dilakukan kepada Badan Publik. Sepanjang tahun 2021, terdapat 117 Register terkait sengketa informasi Badan Publik, dengan 111 Badan Publik yang menjadi termohon pada penyelesaian Sengketa Informasi. Dengan 70 register sengketa berhasil diselesaikan melalui sidang adjudikasi non-litigasi maupun mediasi.
4. **Bapak Ishaq**, Ketua Lembaga Kajian dan Sumber daya Manusia PWNU Sumatera Utara, menjelaskan pengalamannya dalam melaksanakan kokreasi dengan pemerintah dan unsur non-pemerintah lainnya, dengan sebagai berikut:
  - a. Lakpesdam PWNU dalam menjalankan kegiatannya bekerjasama dengan berbagai CSO baik dari CSO keagamaan, CSO kepemudaan, hingga organisasi-organisasi etnis.
  - b. Dalam hal bekerjasama dengan pemerintah, Lakpesdam PWNU diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program Tepat Peduli. Program ini

mendorong untuk melaksanakan rehabilitasi Tempat Pembelajaran Al-Quran (TPA) dan Posyandu di 16 titik di delapan Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

- c. Lakpesdam PWNU juga berpartisipasi dalam seleksi Tenaga Ahi bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam melaksanakan kerjasama ini, Lakpesdam PWNU mendorong prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, agar terpilih calon-calon terbaik yang dapat masuk sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Agama tersebut.
5. **Ibu Asima**, Dosen Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara, menjelaskan terkait proses kokreasi yang perlu didorong dalam mendorong Keterbukaan Pemerintah, dengan sebagai berikut
- a. Kondisi keterbukaan informasi di Indonesia saat ini hanya berada pada kondisi Informasi Statis. Hal ini berarti gaya interaksi/komunikasi organisasi publik dengan masyarakat hanya bersifat satu arah, tatap muka/administratif. Tujuan akhir dari keterbukaan ialah menciptakan kondisi Informasi berbasis partisipasi, kolaborasi, dan partisipasi online (New Public Governance [NPG]). Dalam mencapai kondisi tersebut, diperlukan ko-kreasi antara pemerintah dan non-pemerintah sehingga menciptakan kondisi keterbukaan yang lebih baik.
  - b. OECD menjelaskan dalam menciptakan keterbukaan ialah dengan melaksanakan keterbukaan data, dialog, dan juga informasi. Keterbukaan akan hal-hal tersebut akan menciptakan Digital Citizenship, di mana masyarakat maupun warga negara memiliki kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul, memberdayakan warga untuk berpartisipasi, membentuk kebijakan dan layanan publik, memantau dan mengawasi pemerintah.
  - c. Terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam mendorong keterbukaan pemerintah di kondisi saat ini. (1) Open Government hanya sebagai retorika, belum banyak yang serius menjalankan dan mendorong keterbukaan pemerintah, khususnya bagi badan-badan publik; (2) Rendahnya komitmen pejabat, pejabat tinggi belum *concern* akan hal ini dan mendorongnya sebagai prinsip utama dalam bekerja pada masing-masing instansinya; (3) Keterbatasan pengetahuan pejabat publik, pejabat publik banyak belum memahami tujuan dan manfaat terkait keterbukaan pemerintah; (4) Rendahnya ketertarikan masyarakat, masyarakat belum terinformasikan dengan baik mengenai isu ini dan belum terlalu tertarik akan mendorongnya sebagai suatu tuntutan yang berasal dari masyarakat; (5) Keterbatasan kapasitas NGO, belum semua CSO memiliki kapabilitas untuk mendorong dan berpartisipasi dalam keterbukaan pemerintah. Keterbatasan sumber daya ini meliputi keterbatasan dana hingga kapasitas atau kualitas SDM dari NGO tersebut.
  - d. Dalam mendorong keterbukaan pemerintah, kokreasi dapat menjadi solusi dengan menurunkan ego pada instansi publik terkait ketidaksetaraan, hubungan kekuasaan, dan bentuk-bentuk pemerintahan/birokrasi. Hal ini untuk menjamin partisipasi masyarakat yang terbuka dan juga inklusif.
  - e. Terdapat dua pertanyaan penting juga untuk mendorong keterbukaan pemerintah, yaitu: (1) Bagaimana OG mampu menyediakan platform bagi masyarakat dan memapukan masyarakat untuk bergerak?; (2) Bagaimana

menjamin partisipasi dapat diakses, setara, dan inklusif untuk berbagai golongan masyarakat yang berbeda?

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan seluruh pembicara, didapati bahwa kondisi keterbukaan pemerintah di Indonesia memiliki berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut tercerminkan baik melalui data serta pengalaman masing-masing pembicara. Data-data terkait dengan keterbukaan pemerintah menunjukkan terdapat tantangan khususnya mengenai Transparansi. Selain itu, kondisi dan sikap para pelaksana pemerintahan yang belum mencerminkan dorongan akan keterbukaan pemerintah menjadi tantangan dalam menghadirkan keterbukaan pemerintah

## Dokumentasi

